



## **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS**

**Meita Imansari**

Universitas Galuh Ciamis

**Kiki Endah**

Universitas Galuh Ciamis

**Arie Budiawan**

Universitas Galuh Ciamis

Alamat: Jalan RE. Martadinata No 150 Ciamis

Korespondensi penulis: [meita\\_imansari@student.unigal.ac.id](mailto:meita_imansari@student.unigal.ac.id)

***Abstract.** This study aims to determine how the implementation of infrastructure development policies in Dewasari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency. Infrastructure plays an important role in supporting community activities and local economic growth. However, in its implementation, infrastructure development in Dewasari Village has not been running optimally. The problems identified include low community participation, limited budget, lack of supervision, and infrastructure quality that does not meet the Indonesian National Standard (SNI). This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Informants in this study consisted of village heads, village officials, community leaders, and local residents. The results of the study indicate that the implementation of infrastructure development policies in Dewasari Village still faces various obstacles, both in terms of technical, managerial, and social aspects. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials, budget transparency, and active community involvement to achieve more effective and sustainable development results.*

**Keywords:** Policy Implementation, Development, Infrastructure

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, hingga kualitas infrastruktur yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur

### **LATAR BELAKANG**

Dalam penyusunannya rencana pengembangan dan pembangunan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang di dalamnya berisi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota, hingga desa yang saling terkait dan mendukung satu sama lain, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan. Bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat, serta mampu mendorong investasi dari luar sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu wewenang pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya ialah pembangunan. Kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam mengelola berbagai aspek yang mencakup aktivitas sosial dan ekonomi, maka tentunya pemerintah desa selaku penyelenggara kegiatan harus dapat memiliki kapabilitas dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud, sebagaimana pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan juga kegiatan Pemerintah Desa.

Desa Dewasari pada Tahun 2021-2023 telah melaksanakan kegiatan tersebut yang dalam pelaksanaannya di laksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan di bantu oleh Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta peran aktif seluruh masyarakat. Kelompok Sasaran yang di prioritaskan dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur tersebut adalah warga masyarakat sekitar dalam menunjang perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Desa Dewasari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Rencana Kerja Kegiatan (RKK) Pemerintah Desa Dewasari mempunyai Visi dan Misi dalam rangka mencapai pemerataan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Desa Dewasari Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029, maka Visi Pemerintah Desa Dewasari adalah “Gotong Royong Membangun Desa Dewasari Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”. Sedangkan Misi pemerintah Desa Dewasari, yaitu pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, percepatan pembangunan, penataan dan perbaikan *profile* desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kepemudaan, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa indikator masalah terkait dengan analisis implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis belum optimal. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan seringkali masyarakat mengandalkan ketersediaan anggaran yang sudah ada.
2. Kurangnya anggaran tentang kenaikan biaya tak terduga yang tidak sesuai dengan rencana awal. Hal ini dibuktikan oleh harga material yang naik seiring berjalannya waktu dan pelaksanaan proyek melampaui jadwal yang sudah ditetapkan.
3. Terdapat situasi dan kondisi alam saat keadaan cuaca sedang musim hujan. Hal ini dibuktikan oleh adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dewasari Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis”**.

#### **KAJIAN TEORITIS**

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden). Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Menurut Surbakti (2013:254) mengemukakan langkah-langkah implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan.
2. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.
3. Menyusun sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran.
4. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya.
5. Memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.
6. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses pembantuan dan pelaksanaan kebijakan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh

sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan menyatakan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pembangunan nasional disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia (Ramly et al., 2017).

Kodoatie, R.J., (2005), Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dewasari, Ketua BPD Desa Dewasari, Sekertaris Desa Dewasari, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Dewasari dan 2 orang perwakilan masyarakat sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, penulis uraikan hasil penelitian sebagai berikut.

##### **a. Menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan**

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sumber daya, termasuk anggaran, personil, dan sarana, merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari. Proses penyediaan anggaran dimulai dengan musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam APBDesa. Meskipun ada alokasi dana dari Dana Desa dan bantuan keuangan kabupaten, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur yang sangat banyak. Selain itu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sering kali mengalami keterbatasan teknis dalam mengelola proyek yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa berupaya mencari sumber pendanaan alternatif dan menerapkan sistem gotong royong dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis juga menjadi tantangan, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan dari dinas terkait. Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dalam proses musyawarah dan transparansi anggaran, meskipun masih ada kendala dalam hal koordinasi dan kesepakatan terkait akses lahan untuk pembangunan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses penyediaan sumber daya di Desa Dewasari berjalan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, di mana mereka dapat menyampaikan usulan dan memilih prioritas pembangunan. Namun, terdapat kendala dalam hal akses lahan yang sering kali memerlukan kesepakatan antara warga. Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat cukup terbuka, dengan penjelasan yang jelas mengenai sumber anggaran dan penggunaannya. Masyarakat juga aktif dalam berkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk mempercepat penyampaian informasi. Meskipun demikian, tantangan dalam hal keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Upaya untuk mencari sumber pendanaan alternatif dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proyek melalui sistem gotong royong menunjukkan inisiatif yang positif, namun masih memerlukan penguatan dalam hal pelatihan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan Teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel utama: (1) ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dan dapat dicapai; (2) sumber daya yang mencakup SDM berkualitas, dana, dan waktu yang memadai; (3) karakteristik agen pelaksana yang sesuai dengan sifat kebijakan; (4) sikap/disposisi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang efektif melalui koordinasi yang baik; dan (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif untuk mendukung keberhasilan kebijakan.

**b. Melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan.**

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi dan penjabaran kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari merupakan tahapan krusial yang melibatkan penerjemahan kebijakan makro dari pemerintah pusat dan daerah menjadi peraturan pelaksanaan yang operasional dan sesuai dengan kondisi lokal desa. Proses ini dilakukan melalui sosialisasi kebijakan dalam Musyawarah Desa dan penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes yang melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kompleksitas regulasi yang sering sulit dipahami oleh perangkat desa yang memiliki keterbatasan kapasitas dan pengetahuan teknis. Perbedaan prioritas antara keinginan masyarakat dan arahan kebijakan dari pemerintah pusat juga menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan kebutuhan. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah dan konsultasi kerap mengalami kesulitan memahami istilah teknis sehingga partisipasi mereka kurang optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendampingan oleh tenaga ahli dari PDTI dan penyederhanaan dokumen kebijakan menjadi petunjuk teknis yang

lebih mudah dipahami. Namun, pelatihan bagi perangkat desa dan peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan masih sangat dibutuhkan agar interpretasi kebijakan dapat berjalan efektif dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Begitupula hasil observasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan melalui musyawarah desa telah menjadi forum utama komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun penjelasan sering kali masih menggunakan bahasa yang kurang dipahami masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui musyawarah dusun dan musrenbangdes tampak berjalan, namun tidak semua usulan dapat direalisasikan karena adanya batasan regulasi dan anggaran. Terjadi kesenjangan komunikasi yang membuat masyarakat merasa kurang mendapat informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai perubahan atau perkembangan kebijakan. Kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa untuk memahami dan menjalankan kebijakan masih terbatas sehingga sering membutuhkan pendampingan eksternal. Usaha untuk menyederhanakan dokumen kebijakan dan membuat petunjuk teknis yang lebih mudah dipahami masih berjalan namun belum maksimal. Forum konsultasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar dialog dan koordinasi lebih intensif dan terstruktur. Secara keseluruhan, meski ada upaya yang dilakukan, masih diperlukan perbaikan signifikan dalam hal kapasitas SDM, komunikasi, pelatihan, dan penyederhanaan dokumen untuk meningkatkan efektivitas interpretasi dan penjabaran kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari.

Sesuai dengan teori Sabatier & Weible (2014) "Implementasi kebijakan jarang merupakan proses yang linier; proses ini dibentuk oleh konflik yang terus berlangsung dan negosiasi di antara banyak aktor dengan prioritas yang berbeda-beda. Implementasi yang efektif membutuhkan strategi adaptif yang mampu merespons perubahan konteks politik dan sosial."

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara sederhana dan berurutan, melainkan dipengaruhi oleh dinamika konflik dan interaksi antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan berbeda. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat berhasil dilaksanakan, diperlukan pendekatan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi politik dan sosial yang terjadi di lapangan. Kutipan menyatakan bahwa implementasi kebijakan jarang berjalan secara linier dan sederhana. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi di Desa Dewasari, di mana proses penjabaran dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai dinamika seperti perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat desa, serta kendala teknis dan kapasitas SDM yang terbatas. Proses ini bukanlah sekadar menjalankan aturan, tetapi melibatkan negosiasi dan penyesuaian terus-menerus.

**c. Menyusun sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran.**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai penyusunan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari memperlihatkan bahwa proses ini merupakan komponen esensial yang memerlukan perencanaan sistematis dan komprehensif. Penyusunan langkah kegiatan melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, diikuti dengan penyusunan rencana kerja oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melibatkan berbagai pihak. Walaupun terdapat struktur yang jelas, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga ahli perencana, yang mengakibatkan dokumen perencanaan tidak selalu detail dan sering bergantung pada konsultan luar. Selain itu, jadwal pelaksanaan sering berubah akibat faktor eksternal seperti cuaca dan keterlambatan pencairan dana, yang mengganggu timeline yang telah ditetapkan. Masyarakat terlibat dalam proses identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan fisik, namun komunikasi mengenai perubahan jadwal seringkali tidak tepat waktu, sehingga mereka merasa kurang terinformasi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, penggunaan sistem informasi yang lebih baik, serta penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar penyusunan langkah kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Begitupula observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa proses penyusunan langkah kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari masih menggunakan sistem dokumentasi manual dengan format yang belum terstandarisasi. Dokumen RAB dan kontrak kerja dibuat menggunakan *Microsoft Word* dan *Excel* sederhana, belum memanfaatkan software manajemen proyek yang lebih canggih. Selama mengikuti musyawarah desa, terlihat partisipasi masyarakat cukup aktif dalam identifikasi kebutuhan, namun ketika pembahasan masuk pada aspek teknis penyusunan langkah kegiatan, mayoritas peserta kurang memahami detail perencanaan sehingga diskusi lebih fokus pada “apa yang dibangun” daripada “bagaimana membangunnya secara efisien”. Kondisi geografis Desa Dewasari yang beragam mulai dari persawahan hingga perbukitan memberikan tantangan tersendiri dalam sequencing pelaksanaan proyek, terutama untuk transportasi material dan akses lokasi yang terbatas. Tim

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kayupa et al. (2025) yang menyebutkan bahwa “perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya kapasitas teknis aparat desa, minimnya pelatihan, dan dominasi elite lokal yang menghambat proses identifikasi kebutuhan secara objektif dan sistematis”. Hasil wawancara dengan aparat Desa Dewasari menunjukkan bahwa musyawarah desa masih menjadi sarana utama dalam menjaring aspirasi masyarakat sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Aspirasi

tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun, informan juga mengungkapkan bahwa proses perencanaan kerap terkendala oleh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal perencanaan teknis dan penyusunan dokumen kegiatan.

**d. Pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengorganisasian personil, anggaran, dan sarana materil dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari menunjukkan bahwa pengorganisasian yang rutin dan sistematis sangat penting namun masih menghadapi berbagai tantangan. Struktur organisasi pelaksana pembangunan sudah ada, dengan pembagian tugas yang jelas antara TPK, perangkat desa, dan BPD, tetapi koordinasi antar lembaga seringkali tidak optimal karena kurangnya standar operasional prosedur (SOP) dan tumpang tindih tugas. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam manajemen proyek juga menjadi kendala, di mana banyak anggota belum memiliki pengalaman atau pelatihan yang memadai. Selain itu, sistem dokumentasi dan pelaporan yang masih manual menghambat efisiensi koordinasi informasi. Masyarakat, meskipun terlibat sebagai tenaga kerja lokal dan pengawas sosial, merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pengembangan SOP yang lebih jelas, pelatihan bagi SDM, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antara semua pihak, termasuk masyarakat, agar pengorganisasian dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Begitupula observasi yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa pengorganisasian personil, anggaran, dan sarana materil di Desa Dewasari telah berjalan dengan cukup baik melalui struktur organisasi yang jelas berdasarkan SK pembentukan TPK. Rapat koordinasi rutin dilaksanakan setiap bulan dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, menciptakan komunikasi yang lancar antar personil. Pembagian tugas dan tanggung jawab sudah cukup terstruktur, meskipun masih terdapat beberapa tumpang tindih fungsi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Koordinasi antar lembaga seperti TPK, BPD, dan perangkat desa berjalan harmonis, namun sistem dokumentasi koordinasi masih perlu diperkuat untuk memastikan kontinuitas informasi. Pengelolaan anggaran menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dengan tersedianya dokumen RAB yang lengkap dan transparan. Proses pengadaan barang dan jasa mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan melibatkan ekonomi lokal, memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Pencatatan keuangan dilakukan secara tertib dan pelaporan keuangan disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Meskipun demikian, sistem monitoring realisasi anggaran masih dapat dioptimalkan dengan tools yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi kontrol keuangan. Pengorganisasian sarana dan materil telah dilakukan secara praktis

sesuai kebutuhan proyek dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Mobilisasi peralatan dan material berjalan lancar dengan koordinasi yang baik antara TPK dan penyedia lokal. Penyimpanan material disesuaikan dengan kondisi geografis desa dan kemudahan akses ke lokasi proyek. Pengawasan kualitas material dilakukan secara langsung oleh tim berpengalaman, namun belum ada protokol standar tertulis untuk *quality control* yang dapat menjadi panduan sistematis dalam memastikan kualitas material sesuai spesifikasi teknis.

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Robbins dan Coulter (2016) yang menegaskan bahwa “pengorganisasian yang efektif dalam organisasi publik membutuhkan adanya struktur formal, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem komunikasi yang memungkinkan semua pihak terlibat dapat memahami peran, tugas, dan tanggung jawab mereka secara jelas”. Meskipun rapat koordinasi rutin sudah dilakukan dan partisipasi aktif mulai terlihat, belum adanya protokol tertulis untuk pengawasan kualitas material serta sistem monitoring anggaran yang modern menunjukkan bahwa pengorganisasian di Desa Dewasari masih berada pada tahap transisional menuju efisiensi sistemik. Dasar pengorganisasian sudah terbentuk dan mengarah pada praktik yang dianjurkan teori, namun belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur ideal sebagaimana dijelaskan Robbins dan Coulter, karena masih ada kelemahan dalam SOP dan teknologi monitoring.

**e. Memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.**

Berdasarkan hasil penelitian dengan enam informan yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat berupa peningkatan produktivitas pertanian melalui sistem irigasi yang melayani 204 warga dengan intensitas tanam yang meningkat dari sekali menjadi dua kali setahun, serta kemudahan akses transportasi bagi 287 warga melalui perbaikan jalan yang mengurangi kendala mobilitas dan memudahkan pemasaran hasil pertanian, ditambah dengan penyediaan lapangan kerja sementara yang meningkatkan pendapatan keluarga selama masa konstruksi. Namun, pembangunan ini juga menimbulkan beban berupa gangguan aktivitas sehari-hari akibat pembatasan akses jalan, *temporary water shortage*, kebisingan dan debu dari alat berat, ekspektasi partisipasi gotong royong yang kontinyu, serta kerusakan kecil pada properti warga, dengan adanya ketimpangan distribusi manfaat yang lebih dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi infrastruktur dibandingkan dusun-dusun yang lebih jauh.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari telah memberikan manfaat nyata yang sesuai dengan hasil wawancara, dimana terlihat jelas peningkatan aktivitas pertanian di area sekitar sistem irigasi

DAM dan TPT Saluran Irigasi Liunggunung dengan kondisi sawah dan kolam ikan yang lebih terjaga pasokan airnya, sementara perbaikan TPT Jalan Pasirnenggang menunjukkan kondisi jalan yang tidak lagi becek saat musim hujan dan terlihat adanya peningkatan aktivitas transportasi hasil pertanian ke pasar oleh masyarakat setempat. Namun, observasi juga mengkonfirmasi adanya beban yang dirasakan masyarakat selama masa konstruksi sebagaimana disebutkan dalam wawancara, termasuk gangguan lalu lintas yang menyulitkan akses sehari-hari, temporary water shortage saat pembangunan irigasi, kebisingan dan debu dari alat berat, serta ekspektasi partisipasi gotong royong yang kontinyu dari masyarakat, meskipun semua pihak memahami bahwa beban tersebut bersifat sementara dan terkompensasi dengan manfaat jangka panjang yang dirasakan, dengan catatan bahwa distribusi manfaat masih belum merata ke seluruh wilayah desa dan lebih dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi infrastruktur yang dibangun.

Berdasarkan hasil penelitian, tentang manfaat, beban, dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sejalan dengan teori Dye (2013) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, dan setiap kebijakan mengandung konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian sejalan dengan teori dampak kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (2013). Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari telah memberikan manfaat nyata dan dampak sosial yang sesuai dengan konsekuensi kebijakan sebagaimana dijelaskan teori, baik dari sisi manfaat maupun beban, serta menunjukkan pengaruh terhadap perilaku individu dan masyarakat secara umum.

**f. Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses pembantuan dan pelaksanaan kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan infrastruktur di Desa Dewasari menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dari berbagai pihak, tantangan masih menghambat efektivitas sistem monitoring. Mekanisme pemantauan dilakukan secara berjenjang dari TPK hingga ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, namun masih bersifat manual dan tidak terintegrasi, mengakibatkan data yang tidak akurat. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam monitoring dan evaluasi menjadi kendala utama, di mana banyak anggota memiliki waktu terbatas dan kurang kapasitas untuk analisis data. Sistem dokumentasi yang belum terstandarisasi dan digital juga menyulitkan analisis dan perbandingan data.

Begitupula dengan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari telah berjalan dengan struktur yang cukup terorganisir, meskipun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional. Selama observasi, terlihat bahwa mekanisme monitoring dilaksanakan secara berjenjang dengan

melibatkan berbagai stakeholder mulai dari Pemerintah Desa, BPD, TPK, hingga masyarakat. Kepala Desa melakukan kunjungan monitoring mingguan ke lokasi pembangunan dan menerima laporan rutin dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sementara BPD melakukan pengawasan independen melalui kunjungan lapangan berkala dan verifikasi laporan. Sistem pelaporan yang diamati menunjukkan adanya hierarki yang jelas, dimana setiap proyek wajib membuat laporan progress harian yang kemudian dikompilasi menjadi laporan mingguan dan bulanan. Dokumentasi pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui foto dan laporan tertulis pada setiap tahapan, dengan cross-check terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan. Namun, observasi mengungkap bahwa sistem dokumentasi masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi dengan baik, sehingga sering terjadi kehilangan data atau ketidakakuratan informasi. Partisipasi masyarakat dalam monitoring terlihat cukup aktif, dimana warga sering melakukan pengamatan langsung ke lokasi pembangunan untuk melihat progress dan kualitas pekerjaan. Mekanisme pelaporan dari masyarakat dilakukan melalui RT/RW atau langsung ke TPK ketika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian. Masyarakat juga membentuk kelompok monitoring informal dan melakukan diskusi di tempat-tempat berkumpul seperti mushala sebelum melakukan pelaporan formal.

Implementasi monitoring dan evaluasi (monev) di desa tersebut sejalan secara konseptual dengan teori kebijakan publik, khususnya seperti yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) dalam Wiwit dkk (2020) bahwa monitoring adalah aktivitas internal dan berkelanjutan yang menyediakan informasi untuk evaluasi, guna menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Evaluasi, di sisi lain, adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan dan dampaknya terhadap Masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi monitoring dan evaluasi kebijakan infrastruktur di Desa Dewasari sejalan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan dalam sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Dewasari, Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, secara umum telah mengikuti enam langkah utama implementasi kebijakan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala. Berdasarkan aspek penyediaan sumber daya, desa sudah mengalokasikan anggaran dari Dana Desa dan bantuan kabupaten, namun masih terbatas dibanding kebutuhan yang ada. Aspek interpretasi dan penjabaran kebijakan, desa menghadapi tantangan dalam memahami regulasi teknis dari pusat, namun berusaha mengatasinya dengan pendampingan dan penyederhanaan dokumen. Langkah kegiatan

pelaksanaan telah disusun melalui perencanaan yang melibatkan masyarakat, namun fleksibilitas waktu sering diperlukan karena kendala cuaca dan pencairan dana. Pengorganisasian personil, anggaran, dan sarana telah dilakukan melalui struktur TPK dan perangkat desa, walaupun masih ada tumpang tindih tugas dan kurangnya SOP. Pembangunan infrastruktur telah memberi manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan akses dan produktivitas pertanian, meski beban sementara dan ketimpangan distribusi manfaat tetap ada. Terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, namun masih bersifat manual dan memerlukan perbaikan dalam hal dokumentasi, kapasitas SDM, dan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan menunjukkan progres yang positif namun tetap membutuhkan peningkatan efektivitas dalam berbagai aspek teknis dan manajerial. Adapun saran yang ingin disampaikan adalah Pemerintah desa sebaiknya memberikan pelatihan teknis yang berkelanjutan kepada perangkat desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mampu memahami regulasi, menyusun perencanaan teknis, serta melaksanakan dan mengawasi proyek infrastruktur secara profesional.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Sumber Buku:**

- Agustino loe, Edward III. 2012:149. implementasi kebijakan.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Depok: Prenadamedia Group.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Inu Kencana Syafie, 2019. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen* (Edisi ke-13, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.). (2014). *Theories of the policy process* (3rd ed.). Westview Press.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suhardono, Edy. 2018. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto. 2017. *Metode Riset*, Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Surbakti Ramlan, 2013. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widya Pustaka, Utama

**Sumber Jurnal:**

Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. Seminar Nasional 2022 “Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi,” 1(1), 1689–1699.

Cut nanda keusuma dan Suriani, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan Vol.04, Nomor 1, Mei 2015, ISSN. 2302-8408.

Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiono. “Impelementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.5

Kayupa, O. O., Guampe, F. A., Hengkeng, J., & Balo, M. J. (2025). *Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia*. Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, 6(1), 187–199.

Nurdin, I., & Rorimpandey, M. C. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 1–13.

Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). Seminar Nasional II USM 2017, 1(Oktober), 379–392.

Triwardani, R., & Rochayanti, C. 2014. *Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal*. Reformasi, 4 No.2(2), 102–110.

Wiwit, W., Sulistyaningsih, T., & Kamil, M. (2020). Monitoring dan evaluasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 1–12.

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Dewasari Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.